

PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN

Oleh : Evi Zahara

Abstrak

Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakasai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang komunikasi dan pembangunan masyarakat. Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Adanya perbedaan orientasi pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru memberikan penilaian tentang komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses yang terisolasi perlu merefleksikan difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata kunci : *komunikasi, masyarakat dan pedesaan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di era sekarang ini, pembangunan disegala bidang sedang giat-giatnya dilaksanakan mulai dari perkotaan hingga ketinggian pedesaan. Puluhan juta bahkan ratusan juta dana dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau ke kelompok-kelompok masyarakat di daerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.

Demi keberhasilan pembangunan tersebut maka peran serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan sangatlah penting agar tujuan dari pembangunan tersebut bisa mencapai sasaran, yaitu bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk itu diperlukan suatu komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang hendak membangun dengan masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan tersebut, sehingga pembangunan yang dijalankan bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari adanya komunikasi pembangunan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting, sebagai contoh, suatu kelompok tani perlu mengkomunikasikan tentang kebutuhan pupuk anggotanya kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan kelompok tani tersebut.

Luasnya wilayah Republik Indonesia dengan jenis geografi yang berbeda disetiap wilayahnya, serta budaya yang beragam menjadi satu masalah tersendiri dalam pembangunan dewasa ini, sebab kadangkala suatu program yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal tersebut telah dicoba selesaikan dengan dihadirkan sistem otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola dananya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Konsep komunikasi pembangunan juga tercermin dalam penerapannya di berbagai sektor pembangunan. Keragaman itu segera tampak pada sejumlah bentuk ataupun unit aktivitas yang meskipun mengenakan label yang berbeda, namun jelas menunjukkan keterkaitan dan kesamaan satu sama lain.

Dalam hubungan ini, dapat diidentifikasi beberapa lapangan kegiatan yang menonjol yang pada hakikatnya memiliki misi yang sama, yakni mengkomunikasikan ide-ide dan program penggunaan kepada khalayak yang menjadi sasaran ataupun yang dimaksudkan kelak sebagai penerima manfaat kegiatan yang bersangkutan (Nasution, 2007).

Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Dalam arti sempitnya, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakasai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang telah disampaikan. Saat ini pembangunan yang telah dilakukan pemerintah masih menggunakan sistem top-down yang berarti arah komunikasinya masih searah berupa strategi dari atas ke bawah, seperti instruksi. Sistem top-down ini cenderung memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakat yang mana pemerintah menganggap paling mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dibutuhkan suatu komunikasi agar informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil pembangunan berjalan dengan baik.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang komunikasi dan pembangunan masyarakat.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Komunikasi Pembangunan

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau

perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung secara tulisan melalui media (Onong, 2003;79).

Pada mulanya istilah ini dipopulerkan oleh (dan di kalangan) sarjana dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, kemudian segera diperkenalkan ke Eropa dan negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kemudian istilah pembangunan menjadi suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional meskipun belum ada suatu rumusan yang dipahami secara universal (Nasution, 2007; 27).

Komunikasi Pembangunan adalah proses penyampaian materi dalam rangka meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Secara luas pengertian Komunikasi Pembangunan adalah sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.

Secara khusus Komunikasi pembangunan adalah segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian pesan atau gagasan dan keterampilan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Penerapan komunikasi pembangunan di sektor kehidupan yang dikemukakan di atas tadi, jika dikaji lebih jauh, menunjukkan kesamaan sejumlah karakteristik yang antara lain (Nasution, 2007;174):

- a. Menerapkan prinsip, sistem, dan teknologi komunikasi, sebagai salah satu komponen yang tergolong utama dalam pencapaian tujuan kegiatannya.
- b. Memberikan peranan yang terbilang penting bagi komunikasi di dalam rangkaian struktur kegiatan pembangunan yang bersangkutan.
- c. Menggunakan dan mengembangkan metodologi serta pendekatan yang sistematis dalam pemanfaatan komunikasi pada lingkup kegiatannya.
- d. Memperhatikan kesinambungan dan “saling belajar dari pengalaman di bidang yang lain” khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi.

Komunikasi pembangunan mempunyai tujuan, antara lain memberikan informasi, persuasif (menggugah perasaan), mengubah perilaku, mengubah pendapat atau opini, mewujudkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan. Tujuan-tujuan komunikasi pembangunan ini diharapkan dapat menyebabkan perubahan di masyarakat atau perubahan sosial (*social change*).

Komunikasi pembangunan di Indonesia memiliki tujuan inti, yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia itu sendiri yang harus bersifat pragmatik, yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini dan masa depan.

2.2. Pembangunan Pedesaan

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adanya undang-undang tersebut agar dapat terlaksananya pemerataan pembangunan desa. Secara teoritis, setidaknya ada empat strategi pembangunan pedesaan yang dapat diterapkan, yaitu strategi modernisasi

pertanian, strategi antikeiskinan, strategi pola baru pertumbuhan, dan strategi *land-reform* (Syahyuti, 2006: 192).

Hakikat pembangunan pedesaan adalah memanusiawikan manusia pedesaan supaya menjadi manusia yang dinamis, dewasa, mandiri, dan berani menghadapi dan mengatasi tantangan lingkungan. Kedudukan sebagai subjek penduduk pedesaan melahirkan pendekatan pembangunan pedesaan sebagai suatu totalitas (Kasiyanto, 1994: 206).

Usaha pembangunan pedesaan perlu didekati dengan berbagai cara, seperti penggalian potensi-potensi oleh masyarakat setempat, pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu, pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, serta pembinaan kebijakan pendukung yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberikan iklim yang serasi untuk pembangunan (Slamet, 2003: 12). Dalam suatu pembangunan itu sendiri, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.3. Permasalahan dalam Pembangunan Desa

Permasalahan pembangunan desa berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan kerja terhadap faktor produksi serta informasi yang berkaitan dengan pasar. Dari permasalahan seperti itulah kemudian berkembang menjadi beberapa pokok permasalahan dalam pembangunan desa sebagai berikut : (Mubyanto, dkk. 1988)

1. Kemiskinan, pembangunan bertujuan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia mengalami kesulitan karena berbagai faktor seperti krisis ekonomi.
2. Kesenjangan pada pendapatan masyarakat, para penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani memiliki kesenjangan dalam hal pendapatan dimana petani miskin atau petani yang memiliki sawah tidak terlalu luas akan semakin menurun sedangkan petani yang memiliki modal kuat akan semakin kaya.
3. Kegagalan transformasi, akibat dari strategi industrialisasi yang tidak terencana dan terarah dengan baik dan mengabaikan sector pertanian maka keuntungan dari pertanian akan semakin menurun seiring dengan kenaikan harga produksi dan biaya hidup yang tidak cukup diimbangi dengan perolehan hasil panen.
4. Merosotnya kelembagaan lokal pada masyarakat desa, terjadinya pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat desa serta terjadinya pergeseran persepsi dari masyarakat dalam memandang alokasi sumber daya karena adanya pengaruh dari mekanisme pasar.

2.4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi karena dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain yang mana masyarakat berada posisi bawah, sedangkan partisipasi horizontal terjadi pada saat masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dengan adanya keterampilan yang dimiliki. Setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal satu dengan yang lain yang berarti melakukan kegiatan

kerjasama dengan pihak lain. Partisipasi ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat dapat berkembang secara mandiri (Jahi, 1993 : 25)..

3. Pembahasan

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sisten serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa memiliki peran penting dalam terwujudnya pembangunan nasional secara lebih merata. Pembangunan desa memiliki arti penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal didesa dan menggantungkan hidupnya didesa, pembangunan desa ditujukan agar penduduk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga mampu menggali segala potensi sumber daya yang ada didesa untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berharga.

Dalam pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karean hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalma kegiatan pembangunan.

Pemerintah memegang peranan dalam membangkitkan dan membentuk partisipasi masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan dimulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual. Dalam kedudukannya, pemerintah memegang peranan strategis. Peranan strategis ini berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan yang disebut juga peranan strategis administratif. Peranan pemerintah melalui kemampuan administratifnya dapat melakukan berbagai hal dalam mewujudkan pembangunan pedesaan. Perincian dan pelaksanaan peranan dasar disebut sebagai peranan administratif, yaitu pola perilaku yang diharapkan dari, atau yang telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Kemampuan administratif di bidang pembangunan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui (dalam arti melalui dan dengan dukungan) sistem-sistem pendukung pembangunan. Sistem-sistem tersebut adalah pelaksanaan tugas (*performance*), struktur (*structure*), dan hubungan dengan lingkungan (*environmental linkages*). Pemerintah berperan memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa agar masyarakat mampu melakukannya sendiri. Dalam hal perencanaan, pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (*planning for the community*), kemudian perencanaan bersama masyarakat (*planning with the community*), dan akhirnya perencanaan oleh

masyarakat (*planning by the community*). Dalam menggerakkan partisipasi suatu masyarakat, pemerintah menyesuaikan programnya dengan kebutuhan nyata masyarakat tersebut. Disini dibutuhkan sistem komunikasi *bottom-up*. Namun demikian, pemerintah masih dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan desa. Pola peranan pemerintah tersebut bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Perencanaan bersama ini memadukan antara kebijakan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up* sehingga masyarakat pedesaan dapat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Peran komunikasi dalam hal ini adalah merupakan saluran sosialisasi kebudayaan, yang mencerminkan bahwa komunikasi antar sesama adalah merupakan suatu yang harus dijaga dalam komunikasi di pedesaan, komunikasi tidak sekedar sebuah fenomena pertukaran informasi pengirim dan penerima pesan, lebih dari itu komunikasi merupakan upaya mencapai saling pengertian dan dari komunikasi inilah suatu kebudayaan diturunkan ke generasi selanjutnya. Kemudian komunikasi menyebarluaskan ide-ide baru sehingga menjadi nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini biasanya muncul dari kreatifitas individu-individu atau consensus dari kelompok-kelompok manusia. Komunikasi menyediakan kesempatan dan rentang waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru tersebut.

Corak kehidupan sosial di desa dapat dikatakan masih homogen. Pola-pola interaksi social pada suatu masyarakat ditentukan oleh struktur social masyarakat yang bersangkutan. Dalam interaksi social selalu diusahakan agar supaya kesatuan social (*social unity*) tidak terganggu, konflik atau pertentangan social sedapat mungkin dihindarkan sampai terjadi. Bahkan kalau terjadi konflik diusahakan supaya konflik tersebut tidak terbuka di hadapan umum. Bila terjadi pertentangan diusahakan untuk dirukunkan karena memang prinsip kerukunan inilah yang menjawai hubungan social pada masyarakat pedesaan karena masyarakat ini sangat mendambakan tercapainya keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi pada hakekatnya masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunikasi yang terpisah satu sama lain. Tetapi dalam keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan, karena di antara mereka saling membutuhkan. Kotatertgantungan pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan. Dan desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota.

Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerjasama yang berhubungan secara erat tahan lama dengan sifat-sifat yang hamper sama (*homogen*) di suatu daerah atau wilayah tertentu dengan bermata pencaharian dominant dari sector pertanian (*agraris*). Sifat hakekat masyarakat pedesaan banyak kegotong royongan dan tolong menolong dan kehidupan desa juga tidak selamanya tenang dan damai tetapi juga terdapat ketegangan tertentu.

Sedangkan sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat desa cenderung berbentuk system komunikasi antar persona yaitu pesan disampaikan melalui satu orang kepada orang yang lainnya sehingga suatu berita di samapikan

secara lisan dan akan mendapatkan feedback secara langsung sehingga masyarakat desa terlihat lebih kompak dan harmonis.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini telah berkembang dengan sangat cepat. Tentu saja ini memberikan efek atau pengaruh yang ditimbulkan baik positif atau negatif. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan memerlukan upaya-upaya dan program-program untuk meningkatkan kualitas pembangunan agar tidak semakin tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Untuk mengejar ketertinggalan dan melaksanakan pembangunan termasuk masalah otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak bisa bergantung pada satu program dari pusat (*top-down*) dan juga satu media, apalagi media massa yang rendah daya terimanya di masyarakat pedesaan. Tapi, diperlukan keterlibatan nyata berupa partisipasi masyarakat dalam menunjang program pemerintah tersebut. Dan salah satu media yang dapat dijadikan sarana untuk melibatkan masyarakat adalah menggunakan media rakyat, yang terbukti efektif dan tidak pernah berubah dalam kehidupan masyarakat tradisional. Dengan ini diharapkan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat bisa menggunakan media rakyat dengan tepat dan efektif.

4. Penutup

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil.

Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Adanya perbedaan orientasi pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru memberikan penilaian tentang komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses yang terisolasi perlu merefleksikan difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchjana. 1999. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- _____. 2000. *Dinamika Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Jahi, Amri. 1993. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Kasiyanto, M.J. 1991. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mubyanto, dkk. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Slamet, Margono. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.

